

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam upaya pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Dana Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik desa. Secara khusus, desa mempunyai kewenangan tambahan dalam mengelola keuangannya karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan berbasis desa. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara akuntabel dan transparan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Sementara itu, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa secara jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat. Penerapan akuntabilitas dan transparansi yang baik akan memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Persepsi publik dalam penelitian ini diartikan sebagai penilaian, pandangan, atau tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, khususnya terkait keterbukaan informasi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta manfaat program yang dirasakan masyarakat.

Persepsi publik menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Persepsi masyarakat yang positif menunjukkan adanya kepercayaan terhadap pemerintah desa, sedangkan persepsi negatif dapat mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Robbins dan Judge (2019) menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses individu dalam menafsirkan informasi yang diterima sehingga membentuk suatu penilaian terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, persepsi publik terbentuk melalui informasi yang diterima masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Gambar 1.1 Perkembangan Alokasi Dana Desa Nasional Tahun 2023-2025



Sumber: Pemerintah Desa Pontang (APBDes 2023–2025)

Sumber: Kementerian Keuangan (2023-2025)

Pada tingkat lokal, pengelolaan Dana Desa di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan data APBDes Desa Pontang Tahun 2023–2025, pendapatan desa mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2023 pendapatan APBDes Desa Pontang sebesar Rp2.187.605.208,00, kemudian meningkat menjadi Rp2.258.087.470,00 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp2.395.330.470,00 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang dikelola Pemerintah Desa Pontang semakin besar sehingga menuntut pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparan. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan keadaan darurat desa.

Meningkatnya alokasi APBDes tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pontang memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam mengelola Dana Desa secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengelolaan Dana Desa yang baik tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah desa mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa. Penerapan kedua prinsip tersebut penting karena dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa.

Namun, berdasarkan observasi awal peneliti, pengelolaan Dana Desa di Desa Pontang masih menghadapi beberapa permasalahan. Dari sisi akuntabilitas, sebagian masyarakat belum memahami secara jelas pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, terutama terkait kesesuaian antara perencanaan program, realisasi anggaran, dan hasil kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan masih cenderung bersifat administratif sehingga sulit dipahami masyarakat secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum mampu menilai secara jelas efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan desa.

Dari sisi transparansi, informasi mengenai penggunaan Dana Desa masih disampaikan secara terbatas melalui papan informasi desa dan belum sepenuhnya menggunakan media komunikasi yang informatif serta mudah dipahami masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat belum mengetahui secara rinci program yang dibiayai Dana Desa, besaran anggaran setiap kegiatan, maupun hasil pelaksanaan program desa. Kurangnya keterbukaan informasi yang mudah dipahami masyarakat tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pengelolaan Dana Desa dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap persepsi publik sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Rahmawati et al. (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap persepsi publik. Namun, penelitian Sari dan Wijaya (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi masyarakat karena masyarakat belum memahami laporan keuangan desa. Selain itu, Putra dan Rasmini (2021) juga menemukan bahwa transparansi belum tentu meningkatkan persepsi publik apabila informasi yang disampaikan masih bersifat teknis dan sulit dipahami masyarakat.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan persepsi publik masih belum menunjukkan hasil yang konsisten sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut pada konteks desa yang berbeda. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Pontang, ditemukan bahwa persepsi publik terhadap pengelolaan Dana Desa masih beragam. Sebagian masyarakat mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai alokasi dan penggunaan Dana Desa serta belum memahami laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pemerintah desa. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang telah mengetahui bahwa Dana Desa telah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, maupun berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dirasakan manfaatnya

secara langsung. Perbedaan tingkat pemahaman dan informasi yang diterima masyarakat tersebut menunjukkan adanya variasi persepsi publik terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Pontang. Kondisi ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena mengindikasikan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa belum tentu dipersepsikan sama oleh seluruh masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, peningkatan Dana Desa dan APBDes Desa Pontang menempatkan pemerintah desa pada tuntutan yang lebih tinggi untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Namun, masih adanya perbedaan persepsi publik mengenai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa menunjukkan bahwa efektivitas penerapan kedua prinsip tersebut masih perlu dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap persepsi publik di Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana penerapan akuntabilitas dan transparansi mampu membentuk persepsi publik terhadap pengelolaan Dana Desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap persepsi publik Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
2. Apakah transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap persepsi publik Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa secara simultan berpengaruh positif terhadap persepsi publik Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terhadap persepsi publik Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap persepsi publik Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa secara simultan terhadap persepsi publik Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini berupaya memperkuat landasan teoritis mengenai konsep *good governance* dan *New Public Management* dalam konteks pengelolaan keuangan publik di tingkat desa, yang

selama ini masih memerlukan pengayaan kajian empiris. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris yang membahas hubungan antara akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa dengan persepsi masyarakat sebagai bentuk evaluasi kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana penerapan prinsip tata kelola keuangan desa memengaruhi penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa, baik melalui pengembangan variabel penelitian, penggunaan pendekatan teoritis yang berbeda, maupun penerapan objek penelitian pada wilayah dan karakteristik desa yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas dan memperdalam kajian akademik di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Pontang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memperbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa agar sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi aspek-aspek pengelolaan Dana Desa yang masih perlu ditingkatkan, khususnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah desa untuk menerapkan tata kelola keuangan desa yang lebih tertib, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pontang dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan Dana Desa. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan yang meningkat diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan desa.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparan. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa yang telah berjalan, khususnya yang berkaitan dengan aspek pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan pedoman teknis pengelolaan keuangan desa yang lebih sistematis dan terukur. Pedoman tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Penguatan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prinsip *good governance*.